

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Nurul Puspitasari, Wiwin Priana Primandhana, Sishadiyati

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia

Penulis korespondensi : Nurul Puspitasari

E-mail : nurulpuspitasari.np@gmail.com

Diterima: 28 April 2025 | Direvisi 07 Mei 2025 | Disetujui: 08 Mei 2025 | Online: 10 Mei 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya mengonfirmasi bahwa banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak hingga menunggak selama bertahun-tahun. Tujuan dilakukan pengabdian ini untuk menciptakan upaya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang diakibatkan dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi kegiatan verifikasi lapangan berupa kunjungan secara langsung ke lokasi objek pajak dan wajib pajak yang berada di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa terdapat penambahan masa wajib pajak pada saat dilakukan layanan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dengan realisasi prosentase pembayaran PBB selama satu tahun mencapai 89,13 persen dan menemukan beberapa kasus yang menjadi penyebab wajib pajak tidak membayar seperti objek pajak sudah menjadi fasilitas umum, objek pajak tidak ditemukan, hingga terjadi double NOP (Nomor Objek Pajak) dalam satu lokasi objek pajak.

Kata kunci: pendapatan asli daerah; pajak bumi dan bangunan; wajib pajak.

Abstract

The increase in local revenue can be seen from taxpayer compliance in paying taxes on time. The Surabaya City Regional Revenue Agency confirmed that many taxpayers do not comply with their obligations in paying taxes and are in arrears for years. The purpose of this service is to create efforts that can increase the Regional Original Income of the City of Surabaya resulting from taxpayers' non-compliance with PBB (Land and Building Tax) payments. The method used in this service includes field verification activities in the form of direct visits to the locations of tax objects and taxpayers in Sukomanunggal District, Surabaya City. The results of this service show that there is an increase in the taxpayer period when the PBB payment service (Land and Building Tax) is carried out with the realization of the PBB payment percentage for one year reaching 89.13 percent and several cases were found that were the cause of taxpayers not paying as tax objects. Has become a public facility, the tax object cannot be found, so there is a double NOP (Tax Object Number) in one tax object location.

Keywords: locally-generated revenue; land and building tax; taxpayer.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama yang memberikan pemasukan negara paling tinggi hingga menyentuh angka sebesar 82,4% dari total pendapatan negara keseluruhan. Tidak heran jika pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target dalam memperoleh dan menghimpun penerimaan pendapatan daerahnya melalui berbagai macam sumber pendapatan

termasuk pajak. Pendapatan daerah yang berasal dari pajak sering menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak di suatu wilayah semakin maju wilayah tersebut. Hal ini dapat dimengerti ketika PAD semakin tinggi, maka keterikatan terhadap pemerintah pusat dalam penerimaan APBD semakin rendah. Merujuk pada peraturan daerah yang membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang memiliki sifat memaksa menurut undang-undang. Hal ini tidak menyebabkan ketidakseimbangan secara langsung karena akan dikelola untuk keperluan daerah.

Pendapatan asli daerah dapat dihasilkan melalui perolehan macam-macam pungutan pajak salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan termasuk pajak golongan utama berdasarkan kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh individu atau lembaga di wilayah perkotaan, tetapi tidak mencakup tanah yang digunakan untuk usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Dalam riwayat catatan Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, jumlah objek pajak PBB yang terdaftar di Kota Surabaya menyentuh angka 669.871 objek. Angka tersebut menjadi angka paling besar diantara jumlah pajak yang lainnya. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Sehingga pemerintah daerah dapat menentukan visi, misi, dan tujuan pembangunan secara strategis dikarenakan memiliki kewenangan penuh terhadap daerah atau kawasan yang di pimpinnya (Nainggolan, 2022).

Dari total keseluruhan objek Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kota Surabaya, pemerintah daerah yang mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menghasilkan pendapatan paling tinggi senantiasa mengupayakan yang terbaik dalam menghimpun dan mengelola pendapatan dari pajak tersebut untuk kemakmuran rakyat. Menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017) menyebutkan bahwa perhitungan PBB didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ditentukannya NJOP ini didasarkan melalui harga pasar sekitar dan penetapan harga dilakukan per tahun oleh menteri keuangan bersama pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat objektif dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan berdasarkan keadaan objek pajak yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan (Tala et al., 2024).

Dalam proses pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Daerah Kota Surabaya tidak serta merta berjalan sendiri tetapi dibantu langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang mengedepankan misi untuk tetap memberikan kemampuan yang terbaik dalam proses pelayanan pajak dengan cara yang tepat, efektif, dan transparan serta melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan yang terbuka dan akuntabel dengan tetap memanfaatkan teknologi Informasi.

Salah satu tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya yaitu menghimpun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya, akan tetapi data yang ditemukan terdapat sejumlah wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai rakyat Indonesia. Di Kecamatan Sukomanunggal terdapat sekitar 1.400 data objek pajak yang memiliki tunggakan selama belasan tahun hingga puluhan tahun yang belum dibayar. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius jika tidak dilakukan upaya atau tindakan selanjutnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, judul yang sesuai dengan topik permasalahan yang ada yakni: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

METODE

Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Sukomanunggal yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Surabaya dengan luas 9,23 km² dan kepadatan penduduknya mencapai 11.648 jiwa/km². Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 September – 31 Desember 2024. Rangkaian tahapan dalam kegiatan ini mencakup serangkaian kegiatan yang berfokus pada penarikan pajak oleh masyarakat dengan sumber data utama berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Peserta

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

pelaksanaan kegiatan ini merupakan masyarakat Kecamatan Sukomanunggal yang terdata mempunyai tunggakan PBB dengan data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Metode Pengumpulan Data

Metode kegiatan yang diterapkan dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya yaitu mengadopsi strategi dokumentasi, di mana segala bentuk informasi bersumber langsung dari masyarakat dengan melibatkan serangkaian langkah, termasuk pendampingan langsung kepada masyarakat, penelurusan, pengumpulan tagihan, dan penelitian laporan atau dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Langkah – langkah yang dilakukan meliputi kegiatan verifikasi lapangan ke alamat objek pajak atau wajib pajak guna memberikan penyadaran dan pemahaman kepada wajib pajak atau masyarakat terhadap tugasnya sebagai rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Dalam kegiatan ini sekaligus memberikan surat tagihan PBB kepada wajib pajak untuk segera dilakukan pembayaran.

Fokus kegiatan yaitu melakukan upaya guna mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Kota Surabaya sekaligus mendapatkan informasi di lapangan terkait data yang sudah tidak akurat terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kecamatan Sukomanunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melakukan Verifikasi Lapangan PBB

Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui dan memantau secara langsung apakah lokasi objek pajak dan wajib pajak masih ada atau sudah tidak ada entah itu karena alamat tidak ditemukan atau berubah menjadi bangunan lain. Pada dasarnya kegiatan verifikasi lapangan dilakukan karena terdapat banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya selama belasan tahun hingga puluhan tahun. Hal ini yang membuat petugas pajak dan penulis harus melakukan verifikasi lapangan untuk mencari lokasi objek pajak dan wajib pajak untuk dimintai keterangan. Kegiatan verifikasi lapangan menjadi salah satu upaya untuk membantu dalam meningkatkan pendapatan dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam kegiatan verifikasi lapangan telah ditemukan banyak informasi seperti perubahan objek pajak yang awalnya tanah kosong menjadi fasilitas umum seperti jalan raya, tempat ibadah, dan lapangan. Kemudian ditemukan kasus terkait Nomor Objek Pajak (NOP) ganda di satu lokasi objek pajak yang membuat munculnya dua tagihan PBB di satu alamat objek pajak. Sehingga adanya keterangan tersebut, petugas pajak dan penulis dapat melaporkan ke kantor pajak bahwa terdapat NOP ganda dan salah satunya perlu dihapus melalui kegiatan *entry* data. Gambar 1, proses verifikasi lapangan PBB di salah satu lokasi objek pajak.

Kegiatan *entry* data dilakukan setelah selesai verifikasi lapangan. Kegiatan *entry* data ini digunakan untuk melaporkan kondisi terbaru dari hasil verifikasi lapangan yang ditemukan di lapangan. Kegiatan *entry* data dapat dilakukan di aplikasi atau *website* penagihan pajak milik Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya <https://bapenda.surabaya.go.id:7072/> . Dalam *website* ini penulis dapat memasukkan segala informasi yang didapatkan di lapangan seperti alamat objek pajak tidak ditemukan, kondisi objek pajak sudah berubah menjadi fasilitas umum, kondisi objek pajak ternyata tanah kosong, wajib pajak yang belum sanggup membayar, NOP (Nomor Objek Pajak) yang ganda, dan lain-lain. Sehingga segala informasi yang ditemukan akan sangat berguna bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya untuk pelaksanaan tugas kedepannya. Dari kegiatan verifikasi lapangan dapat menjadi solusi terkait mengapa tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama belasan tahun hingga puluhan tahun ini belum dibayar.

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya



Gambar 1. Verifikasi Lapangan PBB

Melakukan Penyampaian Surat Tagihan PBB

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, penyampaian secara langsung surat undangan yang berisi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilaksanakan supaya wajib pajak dapat memahami terlebih dahulu besaran pajak yang perlu dibayar. Dalam penyampaian ini, penulis sekaligus memberikan arahan bahwa akan ada layanan mobil keliling PBB di lokasi penyebaran surat undangan PBB sehingga diharapkan masyarakat sekitar dapat berpartisipasi dalam pembayaran pajak melalui layanan mobil keliling PBB. Dalam kegiatan ini penulis juga menyampaikan saat terdapat pembebasan denda supaya wajib pajak yang masih terdapat tunggakan PBB dapat termotivasi untuk segera melunasinya. Dalam pembayaran melalui layanan mobil keliling PBB, wajib pajak dapat membayar memakai kartu debit atau tunai. Gambar 2, menunjukkan proses penyampaian surat tagihan PBB kepada wajib pajak sekaligus penyuluhan terkait kewajiban membayar pajak.



Gambar 2. Penyampaian Surat Tagihan PBB

Melakukan Layanan Mobil Keliling PBB

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, melakukan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui kegiatan Mobil Keliling PBB sangat membantu masyarakat sekitar. Gambar 3, layanan Mobil Keliling PBB ini merupakan sebuah kegiatan dimana dilakukannya proses pembayaran PBB oleh wajib pajak di sebuah tempat untuk mempermudah dalam menjangkau lokasi pembayaran PBB. Biasanya kegiatan ini dilakukan di kantor kelurahan atau balai RW setempat.

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Layanan Mobil Keliling PBB akan didahului dengan menyebarkan surat undangan PBB ke lokasi yang akan diadakan layanan Mobil Keliling PBB. Hal ini dilakukan supaya wajib pajak mengetahui bahwa akan ada layanan Mobil Keliling PBB di daerah tersebut sehingga masyarakat dapat antusias untuk melakukan pembayaran dikarenakan lokasinya yang terjangkau.

Wajib pajak yang berkeinginan untuk melakukan proses pembayaran PBB sangat mudah, hanya perlu membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang ingin dibayarkan atau membawa surat undangan PBB yang berisi jumlah tagihan yang perlu dibayar yang sudah disebarluaskan sebelumnya. Dalam upaya melakukan layanan Mobil Keliling PBB ini, terbukti dapat memperbesar perolehan pendapatan asli daerah dengan mempermudah wajib pajak atau masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa harus pergi ke kantor pembayaran pajak yang lokasinya cukup jauh.



Gambar 3. Pelayanan Mobil Keliling PBB

Tabel 1. Data Realisasi PBB Kecamatan Sukomanunggal Tahun 2024

Kelurahan	SPPT Pokok	Pokok PBB
Putat Gede	1.696	19.996.811.372
Simomulyo	4.488	2.558.381.421
Simomulyo Baru	8.040	5.889.560.473
Sonokwijenan	3.632	19.226.729.130
Sukomanunggal	2.894	14.481.559.180
Tanjung Sari	3.961	18.123.906.981
Total	24.711	80.276.948.557

Jumlah SSPD Realisasi Murni	Realisasi Pokok Murni	Jumlah SSPD Tunggalan
980	17.556.347.886	352
2.626	1.919.283.334	1.018
4.277	3.843.469.263	2.026
2.660	15.830.958.431	455
1.792	11.801.395.909	532
3.004	14.568.114.334	403
15.339	65.529.569.157	4.786

Realisasi Tunggalan	Realisasi Murni + Tunggalan	Prosentase (%)
2.110.098.492	19.676.446.378	98,40
352.636.206	2.271.919.540	88,80
701.279.383	4.544.748.646	77,17
1.139.594.391	16.970.552.822	88,27
596.917.135	12.398.313.044	85,61
1.122.655.904	15.690.770.238	86,57
6.023.181.511	71.552.750.668	89,13

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya UPTB 4

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Tabel 1, menunjukkan data realisasi pembayaran PBB di Kecamatan Sukomanunggal pada tahun 2024. Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya unit kerja UPTB 4 mencatat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sukomanunggal selama tahun 2024 mencapai 89,13 persen atau sebesar Rp 71.552.750.668. Realisasi ini berasal dari total realisasi pokok murni yang dibayarkan oleh wajib pajak pada tahun 2024 dan realisasi tunggakan wajib pajak yang memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk realisasi pencapaian kelurahan yang paling besar terjadi di Kelurahan Putat Gede dengan prosentase 98,40 persen, sedangkan realisasi terendah terjadi di Kelurahan Simomulyo Baru dengan prosentase sebesar 77,17 persen. Dengan pencapaian ini, terbukti bahwa penagihan PBB menjadi capaian terbesar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Dari realisasi ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya tetap menghimbau wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya supaya wajib pajak yang masih memiliki tunggakan tidak akan terjadi pembengkakan pajak dikemudian hari. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna mewujudkan kemakmuran rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan hasil dan pembahasan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus mempersiapkan beberapa langkah dalam menghimpun pengelolaan PBB sehingga dapat menjadi daerah yang mandiri. Dalam mencapai target pendapatan daerah perlu adanya upaya strategis seperti melakukan verifikasi lapangan kepada wajib pajak yang terdata mempunyai tunggakan selama bertahun-tahun, melakukan penyampaian surat undangan PBB kepada wajib pajak guna memberikan himbauan secara langsung bahwasanya akan ada layanan pembayaran pajak secara keliling atau sering disebut layanan Mobil Keliling PBB. Upaya-upaya ini terbukti berjalan sesuai rencana dan sukses dalam menaikkan grafik Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dengan realisasi yang didapatkan sebesar Rp 71.552.750.668 atau 89,13 persen. Realisasi ini dapat dicapai salah satunya melalui upaya penyampaian surat penagihan pajak sehingga masyarakat dapat membayar kewajibannya melalui layanan Mobil Keliling PBB atau dengan metode pembayaran lainnya. Dari beberapa upaya tersebut akan memberikan pengetahuan sekaligus kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai rakyat Indonesia dalam membayar pajak sesuai waktunya tanpa menunggak sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh Kota Surabaya. Semakin tinggi pendapatan asli daerah Kota Surabaya, maka akan semakin maju kualitas kota dan masyarakatnya.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya membutuhkan upaya dalam mewujudkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang optimal dengan mengetahui kendala apa saja yang menjadi hambatan di lapangan sehingga dapat menciptakan solusi yang strategis. Saran untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dapat secara rutin untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdeteksi mempunyai data yang sudah tidak akurat, melakukan penyampaian surat tagihan yang terstruktur, melakukan updating data wajib pajak, dan tetap mempertahankan pelayanan yang baik agar menciptakan rasa nyaman kepada wajib pajak dan masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki koleksi data yang banyak dan sangat luas, oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat memanfaatkan secara efektif faktor-faktor yang mendukung pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mewujudkan sistem yang optimal sehingga dapat membantu dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada waktu yang sama, ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan secara langsung dalam melakukan kegiatan pengabdian yang berhubungan dengan perpajakan dengan lancar dan sukses. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Sukomanunggal yang bersedia menjadi objek pengabdian penulis selama kurang lebih 3 bulan. Tanpa

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

bantuan dan dukungan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dan masyarakat Kecamatan Sukomanunggal, penulis tidak akan dapat menyelesaikan pengabdian ini dengan baik dan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, J., & Puspitasari, R. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 7–10. <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.65>
- Agustina, W., & Adhianto, R. D. (2021). *Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Sumedang Periode 2016-2020*. Vol. 5 No. 2.
- Chichi, J., B. Nangoi, G., & Pangerapan, S. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Dan Kota Manado*.
- Desty Febrian, W., Ristiliana, & Permatasari, R. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*. Volume 2 Nomor 1.
- Novianti Pertiwi, R., Farah Azizah, D., & Catur Kurniawan, B. (2014). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)*. Vol. 3 No. 1.
- Nugrahadi, R. (2018). *Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Vol 4 No. 1.
- E., Heru Dwiandoko Program Studi manajemen, T., & Ekonomi, F. (2014). Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Studi Kasus Pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan Periode, Nomor 1, Februari 2020. | 55 (Vol. 3).
- Putra, E., Prodi, N., Fakultas, A., & Dan Bisnis, E. (n.d.). *Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*.
- Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1002. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1697>
- Simbolon, S. (n.d.). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah(Pad) Kota Tangerang*. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Sondeng, S., Putri Uleng, B., Kunci Efektivitas, K., Bumi dan Bangunan, P., & Asli Daerah, P. (2024). *The Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax Revenue in Increasing Regional Own-Source Revenue*. <https://andipandangaijournal.com/index.php/JoESS>
- Takasili Hebimisa, M., J. Sondakh, J., & Wangkar, A. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*.
- Tri irianti, E., & Niswah, F. (2021). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*. Volume 9 Nomor 4.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember*. Vol 9 No. 1.
- Yodiawati Tala, O., Magda Sumualb, F., Theresia Rawung^c, L., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Artikel, I., Kunci, K., & Asli Daerah, P. (2024). Pengaruh Penerimaan BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 5(2), 119–131.